

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah menyebabkan perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia. Perubahan tersebut telah mendorong sebagian besar negara di dunia untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek perdagangan internasional.¹ Kerja sama internasional mengacu pada proses koordinasi kebijakan dan kolaborasi antara negara, pemerintah, dan entitas lain, seperti perusahaan multinasional atau lembaga swadaya masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja yang disepakati bersama.² Dengan adanya kerja sama internasional, membuat arus perdagangan antar negara meningkat dan melahirkan liberalisasi perdagangan serta membawa manfaat yang lebih besar dan tuntutan untuk liberalisasi perdagangan dunia semakin marak dilakukan oleh sejumlah negara dalam berbagai forum perundingan perdagangan.³

RCEP merupakan bentuk kerja sama perdagangan bebas antara negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan enam negara mitra perdagangan bebas ASEAN yaitu, Tiongkok, Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan India dengan tujuan untuk mendorong serta

¹ Susanti Aryaji, "Kerja Sama Perdagangan Internasional", *Elex Media Komputindo*, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ZU1bDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kerja+sama+internasional+perdagangan&ots=Ijex1vyds2&sig=Ik36NPHGTSv_2kW6pFqVFZdR_uE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

² UN Environment, "International Cooperation", <https://globalpact.informea.org/glossary/international-cooperation>

³ Muhamad Ferdy Pratama, "Motif dan Kepentingan China dalam pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)", *JISIP*, Vol. 6, No. 1, 10.36312/jisip.v6i1.2660/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia.⁴ Kerjasama ini berfokus pada perdagangan barang, jasa, investasi, *intellectual property*, *e-commerce*, pengaturan terhadap kerja sama ekonomi dan teknis dan lain sebagainya. RCEP diinisiasikan oleh Indonesia saat menjadi pemimpin ASEAN pada November 2012 di Phnom Penh, Kamboja, bersama dengan beberapa negara mitra lainnya.

RCEP diprediksi akan mencakup 30% dari produk domestik bruto (PDB) global senilai \$26,2 triliun, serta meliputi sepertiga dari populasi dunia atau sekitar 2,2 miliar orang.⁵ Selain itu, kerja sama RCEP yang diinisiasikan oleh berbagai perwakilan negara ASEAN serta beberapa negara lainnya yang tergabung turut memiliki keinginan untuk mempercepat proses integrasi stagnan yang menghalangi pertumbuhan laju perekonomian pasca krisis finansial pada 2008.⁶ RCEP dianggap dapat mengimbangi pengaruh TPP (Trans Pacific Partnership) yang dipimpin AS di wilayah tersebut.⁷

India sebagai salah satu anggota yang turut dalam menginisiasikan RCEP merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dalam perekonomian dunia.⁸ Berdasarkan perhitungan World Bank dimana pertumbuhan ekonomi India yang berkembang secara signifikan diukur melalui *Purchasing Power Parity* menduduki pada posisi ketiga dengan total US\$ 10.193.555 milyar setelah

⁴ Ministry of Trade and Industry Singapore, "Press Release Factsheet on The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)", 2012. Hal. 1

⁵ Nik Martin, "Kesiapan Asia dan Dunia Hadapi RCEP", DW, Kesiapan Asia dan Dunia Hadapi RCEP – DW – 31.12.2021 (diakses 1 April 2023)

⁶ Kristy Hsu, "The RCEP: Integrating India into the Asian Economy," *Indian Foreign Affairs Journal*, Vol. 8, No. 1, January – March 2013, 41-51, hal. 42

⁷ Kristy Hsu, "The RCEP: Integrating India into the Asian Economy," *Indian Foreign Affairs Journal*, Vol. 8, No. 1, January – March 2013, 41-51, hal. 42

⁸ Mark P. Thirlwell, (2004), "India: The Next Economic Giant," Lowy Institute for International Policy. Longueville Media: New South Wales

Tiongkok pada urutan pertama dan AS pada urutan kedua.⁹ Dengan demikian, India dapat memberikan kontribusi dalam kerja sama RCEP apabila India turut serta di dalamnya.

Dalam kebijakan luar negerinya, India menerapkan kebijakan "*Look East, Act East*" untuk meningkatkan keamanan eksternal negara dan mendorong kerjasama strategis di sektor perdagangan global.¹⁰ Pada masa pemerintahan Modi, Kebijakan *Act East* memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan keikutsertaan India dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Timur dengan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Pendekatan kebijakan *Act East* berusaha untuk memperkuat keterlibatan strategis dengan negara-negara seperti Jepang, China, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Hal ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk meningkatkan hubungan di wilayah Asia Pasifik dengan intensitas yang tinggi.¹¹

Dengan adanya ide pembentukan kerja sama RCEP, memberikan kesempatan besar bagi India untuk dapat meningkatkan hubungan dengan ASEAN pada bidang ekonomi. Menurut data Ferrantino, estimasi perolehan PDB dianggarkan sebesar US\$ 654 milyar, dengan peningkatan sebesar 1,5% di tahun 2030 semenjak diberlakukannya RCEP. Dan tentunya negara yang tergabung seperti India, Tiongkok, serta Korea Selatan diproyeksikan akan mendapatkan

⁹ World Bank, (2020), "Gross Domestic Product 2021, PPP," World Development Indicator, https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/GDP_PPP.pdf

¹⁰ Bart Gaens dan Olli Ruohomaki, "India's 'Look East' – 'Act East' Policy," The Finnish Institute of International Affairs, FIIA Briefing Paper 222. https://www.fiaa.fi/wp-content/uploads/2017/10/bp222_indias-look-east--act-east-policy.pdf

¹¹ Amitendu Palit, "India's Act East Policy and Implications for South-East Asia", Yusof Ishak Institute:ISEAS, 2016, hal. 83.

peningkatan PDB tertinggi secara relatif.¹² Dalam RCEP, tentu hal tersebut akan menguntungkan bagi negara-negara besar dengan peluang mendapatkan pasar yang besar dan disaat bersamaan, India akan mengalami peningkatan ekspor terbesar secara signifikan.

RCEP juga memberikan peluang bagi India untuk meningkatkan efisiensi sektor pertanian, memberikan manfaat kepada petani dan dapat mengurangi biaya makan bagi para konsumen.¹³ Maka dengan adanya RCEP dapat memberikan perubahan terhadap negara India dengan harapan agar dapat meningkatkan sektor perekonomian negaranya, memperluas akses pasar perdagangan dengan negara lain, dapat merealisasikan *Make in India, Neighborhood First Policy*, dan dapat menghindari adanya *noodle bowl effect*.

Ketika kerjasama tersebut akan diratifikasi pada tahun 2019, India menyatakan keluar dari forum penyusunan RCEP yang telah disusun kurang lebih selama tujuh tahun. Pada saat konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-22 di Bangkok pada 5 November 2019, dibawah kepemimpinan Narendra Modi, India menarik diri dari negoisasi RCEP dan pada 15 November 2020, 15 negara anggota RCEP meratifikasi perjanjian tersebut kecuali India.¹⁴ Pihak India menilai kerja sama tersebut akan berdampak dan merugikan India dalam mempromosikan industri dalam negerinya.

Selanjutnya Kekhawatiran terhadap neraca perdagangan India yang defisit akibat perdagangan dengan Tiongkok, Ketika RCEP telah diberlakukan,

¹² Michael J. Ferrantino, dkk, "Actual and Potential Trade Agreement in Asia-Pacific: Esimated Effect," World Bank, hal. 9, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/>

¹³ Deborah Elms, "RCEP Brings New Opportunities for Gradual Agriculture Reforms in India," Asian Trade Center, Conference Paper, 2014. <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2297.1204>

¹⁴ Sofia Balino, "With RCEP Agreement Signed, Eyes Turn to Interactions Among Trade Deals in the Asia-Pacific Region," IISD Policy Brief, <http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/with-rcep-agreement-signed-eyes-turn-to-interactions-among-trade-deals-in-the-asia-pacific-region/>

perdagangan tersebut akan menyebabkan tiga perempat barang Tiongkok akan masuk ke India tanpa bea masuk dan akan meningkatkan defisit perdangan India dengan Tiongkok melebihi \$63 miliar saat ini.¹⁵

Alasan lain yang menyebabkan India pada akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan RCEP adalah adanya kendala struktural dan infrastruktur. India dalam hal ini menyampaikan kekhawatiran terkait ketidaksetaraan struktural ekonomi antar negara RCEP yang nantinya dapat merugikan India. Selanjutnya, tekanan dari dalam negeri India untuk melindungi industri domestik seperti industri pertanian, manufaktur dan sejumlah kelompok nasionalis di India juga menentang keputusan negara untuk bergabung dalam RCEP. Mereka menyuarakan keprihatinan akan dampak yang didapatkan pada sektor pertanian dan industri kecil dan menengah India.

Berbagai kalangan masyarakat khawatir bahwa kesepakatan tersebut akan mengakibatkan banjirnya produk impor yang lebih murah, mengancam mata pencaharian petani dan sektor industri menengah ke bawah lainnya. Kelompok ini juga mengkhawatirkan hilangnya kedaulatan ekonomi India serta dampak negatif terhadap sektor manufaktur dalam jangka panjang. Keluarnya India bukan hanya kerugian bagi New Delhi, tetapi juga akan merugikan negara-negara RCEP. Hal tersebut dikarenakan perekonomian India sedang mengalami pertumbuhan dengan pesat pada saat perjanjian ini ditandatangani. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat apa faktor yang membuat India memutuskan tidak tergabung dalam kerja sama RCEP tersebut.

¹⁵ Nilanjan Ghosh, et.al, "China-India Relations in Economic Forums: Examining the Regional Comprehensive Economic Partnership", *Observer Research Foundation*, https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/08/ORF_OccasionalPaper_162_RCEP.pdf

1.2 Rumusan Masalah

RCEP adalah kerja sama yang meliputi kawasan Asia Tenggara dan sejumlah negara lainnya, yang memiliki keselarasan dengan kebijakan Act East sebagai salah satu kebijakan luar negeri utama India. Act East merupakan strategi luar negeri India yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, strategis, dan budaya dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Bergabungnya India dalam kerja sama ini diproyeksikan akan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Pada awal pembentukan RCEP, India secara aktif berpartisipasi dalam perundingan yang berlangsung selama 29 putaran dan lebih dari enam tahun sejak RCEP dimulai pada tahun 2013. Namun, pada November 2019, India menyatakan mundur dari forum kerja sama tersebut karena beberapa faktor. Keputusan India untuk keluar dari RCEP merupakan respon dari masyarakat India yang tidak setuju dan menentang bergabungnya India dengan RCEP dan hanya akan merugikan negara India. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat India memutuskan untuk tidak bergabung dalam RCEP.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan tersebut, Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa faktor yang mendorong India memutuskan tidak bergabung dalam kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat India memutuskan untuk tidak bergabung dari kerjasama RCEP yang telah diratifikasi oleh 15 negara anggota pada 15 November 2020 tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat memperluas wacana serta kajian yang terdapat dalam studi Hubungan Internasional. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan luar negeri suatu negara menjadi sebuah tindakan yang rasionalitas untuk dipertimbangkan demi kepentingan nasional negara.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, memperluas wacana pembaca, serta menjadi bahan kajian bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami pokok bahasan pada topik penelitian ini. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang dapat memotivasi peneliti lain yang ingin meneliti topik sejenis yang berhubungan dengan teori serta konsep yang telah diterapkan dalam penelitian ini, serta dapat menambah bukti empiris dalam kajian kerjasama tingkat Regional.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penulis mencari berbagai acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian saat menganalisis judul yang diangkat.

Penelitian-penelitian ini akan menjadi landasan bagi penulis untuk memperluas cakupan penelitian mereka. Lima tinjauan literatur berikut terkait dengan pertanyaan penelitian.

Referensi pertama adalah *Domestic Politics Force India's Withdrawal from RCEP and Broader Trade Disengagement* yang ditulis oleh Amitendu Palit melalui *Asia Pacific Bulletin*.¹⁶ Dalam artikel ini membahas terkait RCEP yang tidak mendapat dukungan yang besar di India. Sebab RCEP dinilai merupakan kerjasama FTA dengan Tiongkok, meskipun terdapat negara-negara ekonomi regional utama lainnya dalam RCEP. dalam artikel ini palit juga menjelaskan bahwa India mengalami defisit perdagangan yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan kalangan industri, analis, dan pemerintah India atas perdagangan yang tidak seimbang tersebut. ketidakmampuan India untuk mengembangkan basis manufaktur industri yang luas yang dapat menyebabkan ketergantungan pada impor. Artikel ini memiliki kontribusi dan dapat dijadikan referensi terhadap proses penelitian yang dilakukan karena artikel ini menyajikan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan India memutuskan untuk tidak bergabung dalam kerjasama RCEP.

Studi berikutnya yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah *India's RCEP Dilemma with China: Beyond the Legal Texts* yang ditulis oleh Chao Wang dan Vinay Sharma melalui *Wiley Online Library*.¹⁷ Dalam artikel ini membahas terkait dengan beberapa alasan yang menyebabkan India

¹⁶ Amitendu Palit, "Domestic Politics Force India's Withdrawal from RCEP and Broader Trade Disengagement", *Asia Pacific Bulletin-East West Center*, <http://hdl.handle.net/10125/64727>

¹⁷ Chao Wang dan Vinay Sharma, "India's RCEP Dilemma with China: Beyond the Legal Texts", *Pacific Focus Inha Journal of International Studies*, Vol. 36, <https://doi.org/10.1111/pafo.12180>

pada akhirnya memutuskan keluar dari kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). artikel ini menganalisis ketentuan hukum yang memiliki relevansi terhadap penyebab India memutuskan keluar dari kesepakatan perdagangan bebas yang hampir merangkul 30% PDB global tersebut. alasan di balik penolakan India terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, kemungkinan besar terjadi karena adanya isolasionisme yang dihadapi oleh India, adanya perubahan geo-politik antara Tiongkok dan India pasca adanya insiden yang terjadi di lembah Galwan dan juga adanya pandemic Covid-19. Selain itu, adanya hubungan ekonomi yang tidak seimbang, ideologi india yang mempertahankan proteksionis, serta adanya hegemoni India yang semakin meningkat di kawasan Asia-Pasifik merupakan faktor utama bagi India untuk mundur dari RCEP.

Artikel ini bisa menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian. Karena pada artikel ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan India memutuskan untuk tidak bergabung dengan RCEP. sebab India tidak melihat adanya keuntungan yang signifikan yang akan didapatkan India ketika bergabung dengan kerjasama tersebut. maka dari itu, artikel yang ditulis oleh Chao Wang dan Vinay Sharma ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian terkait faktor-faktor apa yang menyebabkan India memutuskan untuk tidak bergabung dalam kerjasama RCEP.

Tulisan ketiga yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah *Was India Right in Not Joining RCEP? A Cost-Benefit Analysis* yang ditulis oleh Monika Jain melalui *India Quarterly: A Journal of International*

Affairs tahun 2021.¹⁸ Artikel ini membahas mengenai berbagai alasan dibalik keluarnya India dari kerjasama RCEP. setelah negosiasi yang berlangsung hampir tujuh tahun, dengan alasan kepentingan nasional dan bahwa perjanjian perdagangan bebas ini tidak sama dengan perdagangan bebas dan menyebabkan lebih banyak pengalihan perdagangan daripada penciptaan perdagangan. Dalam artikel ini, Jain menjelaskan kekhawatiran India terkait defisit perdagangan India dengan 11 dari 15 negara RCEP dan menjadi penyebab utama kekhawatiran tersebut. Neraca perdagangan yang tidak menguntungkan, kekhawatiran tentang dampak pada sektor susu, perlambatan ekonomi, pengalaman masa lalu India terkait FTA, faktor Tiongkok, dsb, menjadi alasan di balik keputusan India untuk memilih jalan keluar dari perjanjian multilateral tersebut.

Masuknya India dalam RCEP tidak akan memberikan benefit yang menguntungkan, sebab India telah menjalin kerjasama bilateral dengan Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Korea Selatan. India juga sudah menjalin hubungan multilateral dengan ASEAN. Dan dampak tarif yang lebih rendah akan terlihat jelas dengan tiga negara lainnya seperti Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru. Lalu adanya kekhawatiran lonjakan impor produk manufaktur dari Tiongkok dan impor produk susu dari Australia dan Selandia Baru. Artikel ini bisa menjadi salah satu referensi dan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian. Karena pada artikel ini telah dijelaskan berbagai alasan mengapa pada akhirnya India memutuskan untuk keluar dari kerjasama RCEP tersebut.

¹⁸Monika Jain, “Was India Right in Not Joining RCEP? A Cost–Benefit Analysis”, *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, Vol. 77 (2021), <https://doi.org/10.1177/09749284211047728>

Keempat, penulis menggunakan tulisan dari Abraham Hugo Pandu Wicaksono dengan judul *India's Withdrawal from Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.¹⁹ Dalam artikel ini dijelaskan bahwa perilaku India yang memutuskan untuk keluar dari perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* dengan berdasarkan teori neoklasikal realisme yang percaya bahwa perilaku aktor dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh konstelasi struktur internasional dan konstelasi domestik. Keluarnya India dari RCEP dipengaruhi oleh perubahan struktur di kawasan Indo-Pasifik dengan hilangnya perimbangan kekuatan China yang ditandai dengan mundurnya Amerika Serikat dari *Trans-Pacific Partnership (TPP)*. Kondisi tersebut diperparah dengan tekanan yang diterima oleh Narendra Modi pada level domestik yang mengalami penolakan terhadap keterlibatan India dalam kerja sama tersebut. Hal tersebut yang mempengaruhi persepsi Narendra Modi yang semula aktif di kawasan dengan adanya kedua faktor tersebut membuat India memutuskan mundur dari RCEP.

Perbedaan artikel ini terletak pada konsep yang akan digunakan. Dalam artikel ini menggunakan teori neoklasikal realisme, sedangkan penulis menggunakan teori dari Bojang AS dengan berfokus pada faktor internal dan eksternal yang membuat India mundur dari RCEP. Artikel ini turut berkontribusi pada penelitian ini karena telah didapatkan berbagai alasan mengapa India pada akhirnya memutuskan keluar dari kerja sama tersebut.

¹⁹Abraham Hugo Pandu Wicaksono, "India's Withdrawal from Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)", *Nation State: Journal of International Studies*. Doi: 10.24076/nsjis.v4i2.571.

Kelima, penulis menggunakan tulisan dari Noudy Naufal dan Shofwan Al-Banna Choiruzzad yang berjudul *Dinamika Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri: Mundurnya India dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.²⁰ Tulisan ini menjelaskan bahwa keputusan India keluar dari perjanjian perdagangan tersebut telah menyimpang dari visi India untuk mendekatkan negaranya pada kawasan Asia-Pasifik, melalui kerja sama ekonomi. Secara umum, perkembangan kerja sama India memiliki citra yang positif terhadap negara-negara di kawasan Asia Timur baik secara bilateral atau multilateral. Akan tetapi, mundurnya India dalam RCEP menimbulkan pertanyaan mengenai aktor yang mempengaruhi India dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam tulisan ini ditemukan beberapa alasan yang menjadi penyebab India keluar dari kerja sama tersebut. pertama, India mengundurkan diri dikarenakan India merasa tidak mendapat keuntungan dalam segi ekonominya, lalu tekanan domestik dari aktor-aktor kelompok nasionalis Hindu seperti *Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)* menjadi salah satu alasan yang kuat mengapa India pada akhirnya memutuskan keluar dalam kerja sama RCEP tersebut.

Perbedaan terletak pada konsep yang akan digunakan. Dimana penulis akan menggunakan konsep dari Bojang AS yang berfokus pada faktor internal dan eksternal yang membuat India memutuskan untuk tidak tergabung dalam kerja sama RCEP. Kontribusi artikel terhadap penelitian ini dapat membantu penulis mengetahui beberapa alasan mengapa India keluar dari RCEP melalui konsep

²⁰ Noudy Naufal dan Shofwan Al-Banna Choiruzzad, "Dinamika Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri: Mundurnya India dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)", *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 14, no. 1, <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.21043>.

penggolongan aktor domestik yang mana terdapat kelompok masyarakat sebagai salah satu penyebab utama keluarnya India dari kerja sama tersebut.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Foreign Policy

Kerangka Konseptual adalah sebuah gambaran konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis masalah dari penelitian. Peneliti menggunakan konsep *Foreign Policy* yang dikemukakan oleh Bojang AS yang berhubungan dengan keluarnya India dalam kerangka kerja sama RCEP. Setiap negara memiliki berbagai tujuan dalam kebijakan luar negerinya, negara-negara tersebut dapat menerapkan kebijakan luar negeri untuk dapat memenuhi dan mencapai kepentingan individu ataupun kolektif. Secara umum, kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara lain, menjaga keamanan nasional, mencapai prestise, dan mendapatkan manfaat bagi negara mereka.

Dalam menyusun kebijakan luar negeri, biasanya berangkat dari tujuan atau permasalahan yang sedang dihadapi, serta strategi yang tepat untuk diterapkan. Menurut Bojang, kebijakan luar negeri dapat didefinisikan dalam tiga bagian.²¹ Pertama, tujuan (end), terdiri dari visi mengenai hasil yang diinginkan atau serangkaian kepentingan dalam berinteraksi dengan negara atau aktor lain. Kedua, cara (ways), terdiri dari strategi atau gagasan seperti taktik diplomatik negara untuk kepentingan nasionalnya. Ketiga, sarana (means), terdiri dari sumber daya yang tersedia yang dimiliki oleh suatu negara baik itu dalam bidang ekonomi atau militer.

²¹ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations", *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 2.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah kumpulan kepentingan yang diinginkan oleh suatu negara saat berinteraksi dengan negara atau aktor lainnya melalui strategi dan gagasan untuk mencapai tujuan nasional, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di negara tersebut. Menurut Bojang pembentukan kebijakan luar negeri dipengaruhi dan ditentukan oleh dua determinan yaitu internal dan eksternal. Dan faktor internal eksternal turut mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara tergantung dari kondisi geopolitik dan lingkungan negara tersebut.²² Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor internal dan eksternal.

A. Faktor Eksternal Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi global, hal ini terkait dengan implementasi politik internasional yang umumnya mengacu pada hubungan antara satu negara dengan negara lainnya pada tingkat internasional. Terdapat lima faktor eksternal sebagai berikut;

1. Sistem Internasional atau Struktur Kekuatan

Sistem internasional memegang peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Bojang meyakini bahwa kerangka politik global berperan penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Contohnya seperti revolusi Bolshevik tahun 1917, munculnya komunis Tiongkok tahun 1949, serta kemerdekaan berbagai negara di Asia dan Afrika, tahun 1980-an, sistem internasional berada pada sistem bipolar selama Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. Peristiwa-peristiwa ini mengubah struktur

²² Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations", *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 2.

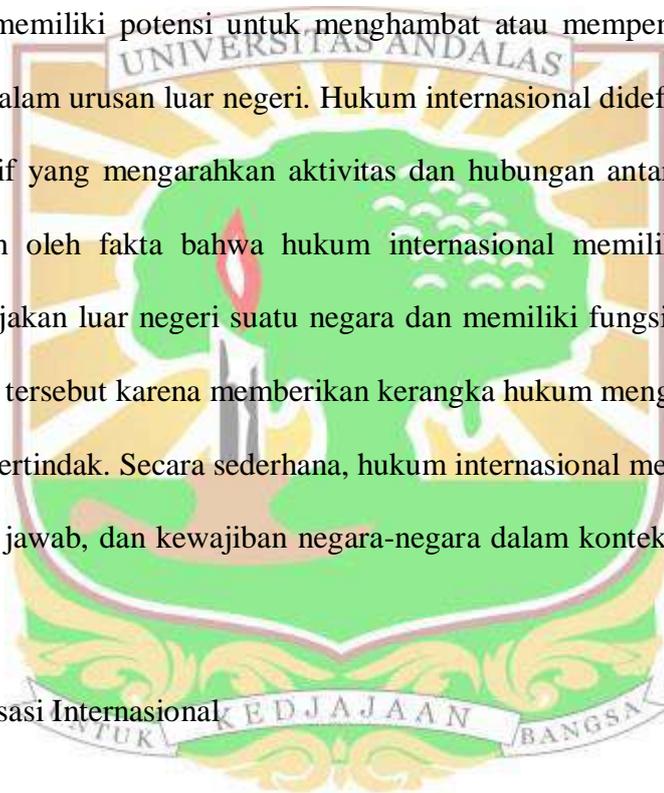
kekuasaan secara signifikan dan berdampak besar pada pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah sesuai dengan struktur kekuasaan atau sistem global yang ada.

2. Hukum Internasional

Adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan antar negara. Bojang mencatat bahwa hukum internasional dan norma-norma yang berlaku di dunia internasional memiliki potensi untuk menghambat atau mempengaruhi perilaku suatu negara dalam urusan luar negeri. Hukum internasional didefinisikan sebagai standar objektif yang mengarahkan aktivitas dan hubungan antar negara-negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum internasional memiliki peran dalam mengatur kebijakan luar negeri suatu negara dan memiliki fungsi yang mengikat dalam konteks tersebut karena memberikan kerangka hukum mengenai bagaimana negara harus bertindak. Secara sederhana, hukum internasional menetapkan status, hak, tanggung jawab, dan kewajiban negara-negara dalam konteks kebijakan luar negeri.

3. Organisasi Internasional

Memiliki peranan yang signifikan dalam struktur global. Menurut Bojang, organisasi internasional dianggap sebagai pemain aktif dalam analisis hubungan internasional karena mereka bertugas untuk memfasilitasi kerjasama antara negara-negara di tingkat global. Ketika merumuskan kebijakan luar negeri, suatu negara mempertimbangkan keberadaan organisasi internasional, blok perdagangan, serta perjanjian internasional. Ketika sebuah negara menjadi anggota dalam organisasi baik di tingkat global, regional, atau sub-regional, itu



berarti negara tersebut telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi yang bersangkutan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan atau langkah mereka akan dipandu oleh konstitusi organisasi tersebut. misalnya seperti Uni Eropa, ASEAN, Uni Afrika, OPEC, ECOWAS, dsb, telah menjadi pemain utama dalam sistem internasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan dan sikap suatu negara.

4. Aliansi

Perumusan aliansi dianggap sebagai salah satu aspek yang menarik dalam hubungan internasional. Hal ini dianggap sebagai landasan kebijakan keamanan. Pembentukan aliansi dianggap sebagai strategi yang digunakan negara dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan negara yang menjadi bagian dari aliansi harus mematuhi permintaan dan tuntutan dari anggota aliansi lainnya serta dapat menahan diri dari pembentukan kebijakan yang bersifat ofensif terhadap aliansi. Bojang juga menyatakan bahwa aliansi dapat membatasi negara-negara di beberapa bidang, tetapi juga dapat memberikan kebebasan untuk bertindak di bidang lain.

5. Strategi Militer/ Perlombaan Senjata

Perlombaan senjata merujuk pada persaingan berlanja pertahanan dan pengembangan kemampuan militer antar dua negara atau kelompok negara. Ini mencerminkan kuantitas dan kualitas kekuatan militer yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang signifikan memiliki keunggulan dan pengaruh yang lebih besar dalam politik internasional.

Seperti peperangan yang masih berlangsung hingga sekarang adalah hubungan negara India-Pakistan, India-Tiongkok, dan Korea Utara-Selatan.

B. Faktor Internal Kebijakan Luar Negeri

Seperti halnya pada faktor eksternal, para ahli sepakat bahwa faktor internal negara juga mempengaruhi sifat dan arah kebijakan luar negerinya. Tiap negara memiliki perbedaan pada aspek sosio-ekonomi, rezim politik, politik institusionalis, struktur masyarakat, militer, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, terdapat sembilan faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu;

1. Kebudayaan dan Sejarah

Para ahli berpendapat bahwa cara berpikir masyarakat dan budaya memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat. Negara mewarisi sebuah tradisi dan budaya yang pada akhirnya akan mempengaruhi dan menentukan arah dan tindakan yang harus diikuti oleh negara tersebut dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Pendekatan suatu negara terhadap permasalahan luar negeri ditentukan oleh nilai-nilai dan keyakinan tradisionalnya yang telah ada dalam kurun waktu yang lama. Kolonisasi juga memainkan peran dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Pengalaman sejarah seperti budaya dan tradisi negara memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri negara tersebut.

2. Geografis, Ukuran, dan Populasi

Ukuran wilayah, geografi, dan jumlah penduduk turut berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara. Letak geopolitik suatu negara juga merupakan faktor kunci dalam menentukan kebijakan luar negeri. Semua faktor ini dapat menjadi instrument yang mengarahkan kebijakan luar negeri negara. Negara-negara dengan wilayah dan populasi kecil seperti Brunei mungkin tidak berharap partisipasi aktif mereka dalam urusan internasional, sementara negara-negara dengan jumlah penduduk dan wilayah yang luas seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia lebih cenderung untuk terlibat dalam urusan internasional. Dari situasi tersebut, terlihat bahwa faktor-faktor seperti geografi memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri.

3. Pembangunan ekonomi dan Ketersediaan Sumber Daya Alam

Ekonomi turut memegang peranan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Banyak negara industri yang memiliki pengaruh dominan dalam politik internasional. Negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Jerman memiliki perekonomian yang kuat sehingga mampu memperluas pengaruhnya melalui bantuan dan pinjaman untuk menjaga kepentingan nasional mereka. Sementara itu, kekayaan sumber daya alam suatu negara juga memperkuat pertumbuhan ekonominya. Sumber daya alam tersebut dapat meliputi mineral, gas, minyak mentah, dan sumber daya air.

4. Kapabilitas Militer

Kekuatan militer memiliki dampak yang besar pada keputusan yang diambil dalam strategi politik luar negeri. Kemampuan untuk melindungi

perbatasan dari ancaman asing memainkan peran kunci dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Negara yang memiliki kekuatan militer yang memadai akan lebih mampu merumuskan kebijakan luar negeri secara independen dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki kekuatan militer yang memadai. Selain itu, kemampuan militer dapat mengubah kebijakan luar negeri suatu negara yang pada awalnya cenderung defensif menjadi agresif. Negara-negara dengan kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, cenderung aktif dan agresif dalam mengejar tujuan kebijakan luar negeri mereka dalam sistem internasional. Di sisi lain, negara-negara dengan kekuatan militer yang lemah cenderung mencapai tujuan nasional mereka dengan membentuk hubungan dengan negara-negara yang lebih kuat.

5. Sistem Politik

Organisasi dan lembaga politik di suatu negara memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Negara yang memiliki pemerintahan otoriter cenderung lebih mampu dan cepat dalam mengambil keputusan luar negeri karena keputusan berada pada individu. Selain itu, negara ini juga cenderung tertutup dalam perpolitikan internasional seperti Myanmar dan Korea Utara. Di sisi lain, dalam sistem demokrasi, implementasi kebijakan luar negeri cenderung lebih sulit dan lambat karena keputusan tersebut melibatkan banyak pihak. Di negara dengan sistem demokrasi, warga memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan dalam dan luar negeri. Pemimpin dalam sistem ini juga cenderung menanggapi tuntutan publik dalam merumuskan kebijakan luar negeri negara.

6. Kepribadian dan Karakter Pemimpin

karakter dan kepribadian seorang pemimpin memainkan peranan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Pengaruh kepemimpinan dan kepribadian terhadap proses tersebut melibatkan proses kognitif yang mengasumsikan bahwa keputusan akhir diambil oleh individu, bukan oleh negara secara keseluruhan. Menurut Bojang, pemimpin dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, "hawks", yang merupakan pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri agresif yang menekankan aspek militer. Kedua, "doves", yang merupakan pemimpin yang cenderung mencari perdamaian dan menyelesaikan konflik internasional tanpa kekerasan. Menurut Herman, pemimpin yang agresif cenderung memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi, sementara pemimpin yang mencari perdamaian cenderung memiliki tingkat nasionalisme yang rendah.

7. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan

Peran partai politik sangat signifikan dalam mengatur suatu negara dalam konteks negara demokrasi. Dalam sistem multipartai, partai politik mengartikulasikan kepentingannya baik secara langsung maupun melalui kelompok kepentingan untuk membentuk kebijakan luar negeri. Di sisi lain, partai oposisi dalam pemerintahan seringkali memiliki pandangan dan kepentingan yang berlawanan, yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Dalam perspektif ini, pejabat pemerintah terlibat dalam negosiasi dengan kelompok kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui keputusan kebijakan negara.

8. Pers dan Opini Publik

Faktor-faktor domestik yang secara luas diakui mempengaruhi kebijakan luar negeri termasuk kelompok kepentingan, pendapat publik, serta media cetak dan elektronik. Tomz membedakan dua cara di mana publik berperan dalam membentuk kebijakan. Pertama, publik dapat mempengaruhi dengan memilih partai atau kandidat yang memiliki arah kebijakan yang sesuai dengan pandangan mereka. Kedua, setelah politisi terpilih, para pemimpin bisa merespon opini publik karena khawatir penolakan publik dapat berdampak negatif terhadap perpolitikan. Selanjutnya, perkembangan media sosial juga mempermudah proses penyampaian opini publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini publik memainkan peran dalam membentuk kebijakan luar negeri dalam konteks sistem demokrasi.

9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang. Dalam beberapa tahun terakhir, pertimbangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sering menjadi titik fokus dalam interaksi antara negara dengan pemerintah lainnya melalui diskusi mengenai topik-topik kritis seperti non-proliferasi nuklir, eksplorasi luar angkasa, pertumbuhan populasi, perubahan iklim, sumber daya energi, dan daya saing industri teknologi. Dengan demikian, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat dan keamanan nasional telah mendorong negara dan para profesional di bidang kebijakan luar negeri untuk memanfaatkannya sebagai alat dalam menangani urusan internasional.

Berdasarkan pemaparan diatas, pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara memerlukan serangkaian proses dan melibatkan berbagai aktor yang berbeda. Politik luar negeri dan politik dalam negeri merupakan satu kesatuan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Dengan berbagai indikator dalam faktor eksternal ataupun internal secara langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara dan keputusan kebijakan luar negeri. Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri berasal dari isu-isu politik dalam negeri dan juga hubungan luar negeri suatu negara.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode ilmiah yang mencakup prosedur atau langkah-langkah yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan ilmiah atau ilmu.²³ Metodologi penelitian merupakan sebuah sistem atau ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis.²⁴

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Susan E Wyse, pendekatan kualitatif bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku.²⁵ Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif analitis dimana metode tersebut berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang

²³ Prof. Dr. Suryana, M.Si, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), pdf.

²⁴ Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal. 11.

²⁵ Susan E. Wyse, "What is the Difference Between Qualitative Research and Quantitative Research", dalam <https://www.scribd.com/doc/269247947/What-is-the-Difference-Between-Qualitative-Research-and-Quantitative-Research#>.

telah terkumpul sebagaimana adanya.²⁶ Adapun tujuan penulis menggunakan metode ini agar dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat India tidak bergabung dalam kerja sama RCEP dengan menggunakan kerangka konsep *Foreign Policy* oleh Bojang AS.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan berdasarkan rentang waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Tahun 2012 dipilih karena merupakan tahun diinisiasikan nya pembentukan kerja sama RCEP. Sedangkan tahun 2019 dipilih karena India memutuskan keluar dan tidak bergabung dalam kerja sama tersebut.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dalam sebuah penelitian merupakan unit atau objek yang perilakunya hendak di deskripsikan, ramalkan, serta jelaskan.²⁷ Unit analisis disebut juga sebagai variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Sedangkan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis. Unit eksplanasi disebut juga sebagai variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel dependen.²⁸ Pada penelitian ini, unit analisisnya adalah keluarnya India dari kerja sama RCEP. Sedangkan unit eksplanasi yang digunakan adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009,

²⁷ Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (Jakarta: LP3ES, 1990) : 35

²⁸ Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (Jakarta: LP3ES, 1990) : 36

Selanjutnya tingkat atau level analisis merupakan landasan dari unit yang akan diteliti. Dalam teori Singer, terdapat tiga level dalam menganalisis aktor internasional, diantaranya level individu, seperti presiden atau perwakilan diplomatik suatu negara, kedua adalah level nasional atau negara, analisis fenomena yang terjadi pada suatu negara yang mencakup isu ekonomi dan isu politik, dan terakhir adalah level internasional, analisis terhadap sistem internasional antar negara.²⁹ Pada penelitian ini, level analisis yang dibahas oleh peneliti adalah level nasional atau negara, karena yang akan diteliti adalah keluarnya India dari kerjasama RCEP.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini telah menggunakan data sekunder berupa literatur yang relevan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat peneliti. Data sekunder menurut Kenneth D. Bailey merupakan dokumen yang diperoleh orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer.³⁰ Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti, website resmi ASEAN (www.asean.org), dalam website ini telah dilihat lebih lanjut terkait perkembangan RCEP, *Asian Development Bank* (<https://www.adb.org/>), melihat secara rinci terkait RCEP mulai dari berbagai peraturan yang disepakati, serta penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang disepakati. Selain itu sumber yang berasal dari portal berita nasional maupun internasional, seperti

²⁹ Singer J. David, "The Level Analysis Problem in International Relations", *World Politics* 14, no. 1, 1961. Hal. 77-92

³⁰ Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal. 68-69.

Australian Governemnt (<https://www-draft-gov-au.com>), *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (<https://www.eria.org/>),

Dalam penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal internasional yang berjudul *The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade dalam Intereconomics* karya Lisandra Flach, Hannah Hildenbrand, Feodora Teti (<https://www.intereconomics.eu/>) yang menjelaskan mengenai dinamika yang terjadi dalam RCEP, bagaimana RCEP kedepannya dalam perdagangan global, dsb. Dan terdapat beberapa sumber data yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan data guna memperoleh suatu bentuk keteraturan. Data-data penelitian yang telah didapat peneliti kemudian diinterpretasikan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggambarkan apa faktor-faktor yang membuat India memutuskan tidak bergabung dengan kerja sama RCEP dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri oleh Bojang AS. Berikut tahapan analisis data yang disederhanakan oleh peneliti yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan faktor-faktor yang membuat India memutuskan untuk tidak bergabung dalam kerja sama RCEP.
2. Menganalisis apa tujuan dari India memutuskan untuk tidak bergabung dengan kerja sama RCEP.

3. Menganalisis dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri oleh Bojang AS untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan menggunakan dua variabel, yaitu:

1) Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal, penulis akan berfokus terhadap beberapa faktor dari luar negara India yang pada akhirnya India mengambil keputusan untuk tidak bergabung dengan RCEP.

2) Faktor Internal

Dalam faktor internal, penulis akan berfokus kepada faktor-faktor dalam negeri India yang mempengaruhi keputusan India untuk tidak bergabung dengan kerja sama RCEP.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang peneliti dalam melakukan analisis terhadap Kebijakan India terhadap kerja sama RCEP tersebut. Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang yaitu, latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, teori dan konsep, metodologi penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan dari penelitian tersebut.

BAB II : Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Bab ini akan memaparkan dinamika yang terjadi dalam pembentukan RCEP berdasarkan negosiasi yang dilakukan dari tahun ke tahun meliputi

berbagai kesepakatan RCEP dengan menampilkan berbagai tujuan RCEP, Isi perjanjian dalam kerja sama, dan pentingnya kerjasama ini dalam meningkatkan perdagangan dan integrasi ekonomi antar negara kawasan.

BAB III : India dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Bab ini akan membahas mengenai kerjasama ekonomi regional yang telah diikuti oleh India sebelum ikut serta dalam proses pembentukan RCEP. Bagaimana dinamika yang terjadi pada saat proses pembentukan RCEP dan bagaimana implementasi RCEP dalam kebijakan ekonomi India.

BAB IV : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri India Dalam Kerja Sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Pada bab ini, akan menjadi temuan data dengan menyajikan hasil analisis mengenai kebijakan luar negeri India dalam kerja sama RCEP tersebut dengan menggunakan konsep *Foreign Policy Analysis* dari Bojang AS. Analisis tersebut akan berfokus kepada faktor internal dan juga eksternal India yang menjadi penyebab India memutuskan tidak ikut serta bergabung dalam kerja sama RCEP.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang ditemukan terkait kebijakan India dalam RCEP serta saran terhadap penelitian selanjutnya.

